



Lentera

JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN

Pembelajaran Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka pada Fase A: Sebuah Analisis

Muhammad Kaulan Karima^{1*}, M. Nazali Romadhon Hafild², Tiya Permana Putri³,
Frianka Ivana Damayanti⁴, Emilia Sari⁵, Dea Andini⁶, Amelia Zahra⁷, Shella Dyah
Wulansari⁸, Gito Ronaldo⁹, Mohammad Moda Adha¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Lampung

^{1*}kaulan@fkip.unila.ac.id, ²dhonihafild@gmail.com, ³ddeliondan@gmail.com,

⁴friankaivanad@gmail.com, ⁵emiliasari158.es@gmail.com, ⁶deaandinnii@gmail.com,

⁷ameliazahraap@gmail.com, ⁸shelladuta8@gmail.com, ⁹gitoronaldo2@gmail.com,

¹⁰mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id

How to cite (in APA Style): Karima, et al. (2025). Pembelajaran Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka pada Fase A: Sebuah Analisis. *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 18 (1), pp. 9-18.

Abstract: Pancasila education is an educational program that aims to instill the basic values of Pancasila in society, especially students from an early age. This education focuses on the five principles in the Pancasila of Godhead, Humanity, Unity, Democracy and Justice - which reflect the basic values of the Indonesian nation. Through Pancasila education, students are taught to understand and apply moral, social and nationalist values that support national unity, respect diversity and encourage participation in national life. In the Merdeka curriculum, Civics learning outcomes for phase A students include the introduction of Pancasila symbols and principles, application of Pancasila values in everyday life, and respect for diversity. Analysis at SDN 1 Langkapura shows that learning Pancasila education is still limited to memorizing the principles of Pancasila, without a deep understanding of its values, as well as students' lack of mastery of the concept of rights and obligations. This emphasizes the importance of using contextual and interactive approaches, such as role playing and practical activities, to facilitate learning that is appropriate to students' developmental stages of thinking. Apart from that, increasing teacher competence and integrating Pancasila values in daily learning is the key to achieving optimal learning goals.

Keywords: Civics, Independent Curriculum, Phase A

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar (SD) bertujuan membentuk karakter siswa dan memperkenalkan mereka pada konsep kewarganegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Materi PKn di SD dirancang untuk menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai

warga negara serta memperkenalkan nilai-nilai dasar seperti toleransi, rasa cinta tanah air, dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, PKn juga bertujuan untuk mengembangkan sikap demokratis dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa. Namun, meskipun memiliki tujuan yang sangat mulia, implementasi materi PKn di SD seringkali menghadapi berbagai tantangan. Analisis materi Pendidikan Pancasila di kelas 1 SD dalam kurikulum Merdeka menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual dan interaktif untuk memperkenalkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada siswa pada tahap awal pendidikan. Salah satu penelitian menyoroti penggunaan metode pengajaran yang melibatkan aktivitas bermain peran dan kegiatan praktis, yang efektif dalam membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, kerjasama, dan kedisiplinan. Metode seperti ini dianggap penting untuk memudahkan pemahaman karena anak-anak pada usia ini masih berada pada tahap berpikir konkret sehingga membutuhkan pendekatan yang dapat diakses melalui praktik langsung dan visualisasi sederhana (Nurhaeni et al., 2024).

Beberapa kendala sering muncul, seperti keterbatasan sumber belajar dan perbedaan tingkat pemahaman antara siswa. Tantangan lainnya termasuk integrasi nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran lain, serta peran orang tua dan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembentukan karakter anak secara berkelanjutan. Menurut studi lain, peningkatan keterampilan guru dalam menggabungkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dinilai penting agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa di rumah dan di Masyarakat (Budiwati et al., 2023).

Kebutuhan untuk mengembangkan model pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKn juga menjadi sorotan, mengingat pentingnya pemahaman tentang keberagaman di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian materi pendidikan multikultural saat ini masih terintegrasi dengan materi PKn, yang menunjukkan kesiapan guru dan sekolah untuk mengimplementasikan model ini (Sumantri et al., 2017). Selain itu, strategi pembelajaran yang melibatkan nilai-nilai Pancasila, seperti Value Clarification Technique (VCT), juga berkontribusi positif terhadap kompetensi pengetahuan siswa dalam PKn (Tyas & Mawardi, 2016; Sudiana, 2023).

Pada capaian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase A, peserta didik diharapkan mampu: (1) Mengenal dan menceritakan simbol dan silasila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila; mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila; menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah; mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah; menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan sekolah; menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. (2) Menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan hobinya; menyebutkan identitas diri (fisik dan non fisik) keluarga dan teman-temannya di lingkungan

rumah dan di sekolah; menceritakan dan menghargai perbedaan baik fisik (contoh: warna kulit, jenis rambut, dll) maupun nonfisik (contoh: miskin, kaya, dll) keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. (3) Mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerja sama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah; mengenal ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dan sekolah, sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI; dan menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta mempraktekannya di lingkungan keluarga dan sekolah.

Di SDN 1 Langkapura sendiri materi Pendidikan Pancasila masih belum mencapai tingkatan peserta didik bisa mengidentifikasi nilai-nilai pada butir sila-sila yang ada, melainkan hanya dapat melafalkan sila pancasila saja. Selain itu juga peserta didik masih belum memahami perbedaan antara Hak dan Kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini menyebabkan sulitnya pengimplementasian materi Pendidikan Pancasila di kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga, peneliti ingin menelaah dan menganalisis materi Pendidikan Pancasila yang seharusnya sesuai dengan tingkat capaian belajar siswa serta kendala maupun solusi yang akan ditawarkan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah Bagaimana materi PKn pada Fase A di Sekolah Dasar? Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar? Apa solusi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dan kendala dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Peneliti melakukan kajian hasil penelitian terkait materi pelajaran Pkn fase A yang terdapat pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yakni artikel-artikel penelitian yang relevan (Ayudha & Setyarsih, 2021). Hasil kajian dideskripsikan berdasarkan dua fokus utama yaitu; 1) analisis pada materi pembelajaran Pkn fase A, 2) kendala dalam pembelajaran PKn fase A, dan 3) Solusi dalam mengatasi tantangan pada pembelajaran PKn fase A

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Pancasila adalah program pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada masyarakat, khususnya peserta didik sejak usia dini. Pendidikan ini berfokus pada lima sila dalam Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan-yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral, sosial, dan nasionalisme yang mendukung persatuan bangsa, menghargai keragaman, dan mendorong partisipasi dalam kehidupan bernegara.

PKn di Fase A berfokus pada pembentukan karakter dasar, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Menurut penelitian oleh Sumarni (2021), pendidikan karakter harus dimulai sejak dini agar siswa memahami nilai-nilai dasar yang akan membentuk perilaku positif mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru dapat memperkenalkan nilai-nilai ini melalui cerita dan contoh situasi nyata yang mudah dipahami anak-anak (Sumarni, 2021).

Pembelajaran di Fase A juga memperkenalkan konsep kebhinekaan, di mana siswa diajarkan untuk mengenal dan menghargai perbedaan, seperti perbedaan suku, budaya, dan agama di Indonesia. Menurut Yuliana (2022), siswa pada fase awal ini perlu diajarkan cara menghargai teman yang berbeda agar bisa hidup rukun dalam keberagaman (Yuliana, 2022).

Pembelajaran di Fase A juga mengajarkan hak dan kewajiban sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati hak teman untuk bermain dan mengikuti aturan di sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Anggraini (2023), yang menemukan bahwa siswa yang diajarkan tentang hak dan kewajiban cenderung lebih menghargai hak orang lain dan lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka sendiri (Anggraini, 2023).

Pada tataran formal, pendidikan Pancasila diterapkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan menjadi bagian integral dalam kurikulum nasional. Program ini juga diselaraskan dengan kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi guru untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pembelajaran praktis di kelas. Materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Fase A, yang biasanya mencakup pendidikan dasar, memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan pengetahuan siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Analisis Pembelajaran PKn Fase A

Berikut adalah analisis beberapa aspek penting dalam materi PKn Fase A.

1. Tujuan Pembelajaran

a. Pengenalan Hak dan Kewajiban

Siswa diperkenalkan pada konsep dasar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini mencakup pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

b. Pemahaman tentang Pancasila

Materi ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Siswa diajarkan untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Siswa diajak untuk mengenali identitas nasional, termasuk simbol-simbol negara, lagu kebangsaan, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

2. Metode Pembelajaran

a. Diskusi Kelas

Melalui diskusi, siswa dapat berbagi pandangan dan pengalaman mengenai kewarganegaraan, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi.

b. Permainan Peran

Metode ini memungkinkan siswa untuk berlatih peran sebagai warga negara yang baik, misalnya dengan berpartisipasi dalam simulasi pemilu atau kegiatan masyarakat.

c. Proyek Kelompok

Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, seperti lingkungan atau sosial.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam PKn Fase A biasanya dilakukan melalui:

a. Ujian Tulis

Menguji pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan.

b. Penilaian Praktik

Mengamati keterlibatan siswa dalam diskusi atau proyek kelompok sebagai bentuk penilaian sikap dan keterampilan sosial.

c. Refleksi Diri

Siswa diminta untuk menulis refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Tantangan

a. Minimnya Kesadaran Kewarganegaraan

Banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kewarganegaraan, sehingga perlu pendekatan yang lebih menarik untuk meningkatkan kesadaran mereka.

b. Variasi Latar Belakang Siswa

Perbedaan latar belakang budaya dan sosial siswa dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi PKn.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Terkadang, keterbatasan buku atau bahan ajar yang relevan dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif

Problematika Materi PKn Fase A

Setiap proses pembelajaran seringkali menghadapi berbagai masalah yang cukup kompleks. Tantangan ini bisa berasal dari faktor-faktor seperti kurikulum, guru, siswa, fasilitas, dan sumber belajar lainnya. Namun, sayangnya banyak pendidik yang kurang tanggap terhadap permasalahan ini. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan, dapat diidentifikasi sejumlah masalah pada materi yang menyebabkan pembelajaran PKn menjadi kurang menarik, dianggap tidak penting, membosankan, dan memunculkan kesan negatif lainnya. Adapun masalah-masalah yang terdapat pada pembelajaran PKn di SD meliputi:

1. Kurikulum PKn untuk tingkat SD dianggap terlalu tinggi, dengan konten yang dirasa melebihi kapasitas pemahaman anak-anak usia sekolah dasar. Misalnya, untuk materi pada fase A tentang Pengenalan Hak dan Kewajiban, Pemahaman tentang Pancasila, serta Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Mengajarkan materi hak dan kewajiban dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada fase A (kelas awal SD) sering menemui beberapa tantangan, baik dari segi pemahaman siswa maupun cara penyampaian. Pada usia ini, anak-anak sering kesulitan memahami konsep abstrak seperti hak dan kewajiban karena kemampuan berpikir mereka masih berkembang secara konkret.
2. Mengajarkan materi pemahaman tentang Pancasila pada fase A (kelas awal SD) menghadapi sejumlah kesulitan. Pada usia ini, siswa sering kali belum memiliki kemampuan berpikir abstrak yang memadai, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami konsep-konsep nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Hal ini membuat guru perlu menyederhanakan materi dan menyampaikannya melalui contoh-contoh yang konkret serta relevan dengan pengalaman sehari-hari anak. Sama seperti materi sebelumnya kesadaran berbangsa dan bernegara anak-anak pada fase ini cenderung masih dalam tahap perkembangan kognitif yang konkret-operasional, sehingga sulit memahami gagasan abstrak seperti identitas nasional, kewarganegaraan, dan peran individu dalam negara. Mereka lebih mudah memahami konsep yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti keluarga dan lingkungan sekitar, dibandingkan dengan konsep negara atau bangsa.
3. Peserta didik sering menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan materi tentang aturan di lingkungan keluarga, serta mematuhi aturan. Anak-anak pada fase A cenderung lebih memahami aturan yang lebih sederhana dan langsung, misalnya aturan dalam bermain atau di sekolah, daripada aturan yang berlaku di rumah, yang seringkali lebih kompleks dan terkait dengan nilai atau norma keluarga. Peserta didik sering kali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menghargai

identitas dirinya yang terkait dengan aspek seperti jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah.

4. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk konsep-konsep yang lebih kompleks seperti identitas gender, hobi, atau agama mungkin belum sepenuhnya mereka pahami secara mendalam. Mereka cenderung lebih mengerti perbedaan fisik dan aktivitas sehari-hari, tetapi kesulitan dalam mengaitkan ini dengan aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Selanjutnya identitas diri anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan teman-teman di sekolah. Jika lingkungan mereka tidak mendorong perbedaan atau keberagaman, anak-anak mungkin akan kesulitan untuk menghargai atau mengenali identitas orang lain yang berbeda, terutama dalam hal agama, kepercayaan, atau budaya. Oleh karena itu, pengajaran yang memperkenalkan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Solusi dari Permasalahan Materi PKn Fase A

Dalam mengatasi masalah terkait materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Fase A di Sekolah Dasar, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Materi pendidikan pancasila perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak-anak di usia sekolah dasar, khususnya pada Fase A. Materi tentang hak dan kewajiban atau nilai-nilai Pancasila sebaiknya disampaikan dengan konsep dasar yang mudah dipahami. Belajar berdasarkan realita. Belajar akan bermakna bagi siswa kalau apa yang dipelajari itu bermanfaat bagi kehidupannya. Peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar siswa dapat menjadi topik menarik untuk dipelajari. Dan ini akan bisa menumbuhkan kepedulian sosial siswa (Komala Sari Harahap et al., 2024). Kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalnya mengenalkan aturan di rumah dan sekolah serta pentingnya aturan melalui diskusi interaktif serta dengan dukungan Teknologi atau Media Interaktif Penggunaan teknologi seperti video atau aplikasi sederhana dapat membantu memperjelas materi PKn yang abstrak.
2. Dalam mengatasi materi yang bersifat abstrak guru dapat memberikan pembelajaran berdasarkan realita (Hendrizal, 2019). Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep abstrak dengan melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi menjadi lebih nyata dan relevan. Guru dapat menghadirkan studi kasus dari berita atau situasi nyata yang relevan, misalnya, kasus tentang hak asasi manusia, partisipasi masyarakat dalam pemilu, atau kebijakan pemerintah terkait kebebasan berpendapat. Dengan mendiskusikan studi kasus ini, siswa bisa melihat penerapan konsep abstrak dalam situasi nyata. Simulasi peran, seperti bermain peran dalam

pengambilan keputusan dalam pemilu atau diskusi kelas tentang isu tertentu, juga dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dalam konteks praktis.

3. Solusi lain yang dapat dilakukan guru yaitu dengan menggunakan sumber belajar nyata seperti dokumen perundang-undangan, teks proklamasi, atau rekaman pidato kenegaraan. Dengan melihat dan menganalisis sumber-sumber ini, siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep seperti demokrasi, hak-hak warga negara, atau kewajiban negara, karena mereka berinteraksi langsung dengan elemen nyata dari konsep tersebut. Dalam mempelajari materi yang bersifat abstrak guru dapat mengaitkan pengalaman siswa dengan materi sehingga bisa memperjelas konsep abstrak. Misalnya, saat membahas tentang hak dan kewajiban, guru dapat meminta siswa untuk menceritakan pengalaman mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban di rumah atau sekolah. Ini membantu siswa memahami bahwa konsep PKn adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya pada materi kerjasama dan gotong royong yang membahas tentang pentingnya kerja sama, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan gotong royong, seperti membersihkan kelas. Guru dapat membagi siswa dalam kelompok untuk membersihkan area tertentu di kelas, mengajarkan mereka tentang kerja sama dalam kegiatan sehari-hari.

SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar bertujuan membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, pembelajaran PKn diharapkan mampu menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membangun sikap demokratis. Namun, implementasi pembelajaran ini sering menemui kendala, seperti keterbatasan sumber belajar, perbedaan tingkat pemahaman siswa, serta kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat.

Pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran PKn untuk siswa fase A mencakup pengenalan simbol dan sila Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan penghargaan terhadap keberagaman. Analisis di SDN 1 Langkapura menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila masih terbatas pada hafalan sila Pancasila, tanpa pemahaman mendalam tentang nilai-nilainya, serta kurangnya penguasaan siswa terhadap konsep hak dan kewajiban.

Hal ini menegaskan pentingnya penggunaan pendekatan kontekstual dan interaktif, seperti bermain peran dan aktivitas praktis, untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 12(3), 45-56.
- Harahap, K. S., Sintia, L., & Siagian, E. A. (2024). *Solusi Atas Kesulitan Guru dalam Mengajarkan Materi PKN di SD*. 2(4), 428–431.
- Hendrizar. (2019). Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sd Dan Solusinya. *Jurnal PPKn & Hukum*, 14(2), 54–62.
- Komala Sari Harahap, Lia Sintia, & Enjelyn Agria Siagian. (2024). Solusi Atas Kesulitan Guru dalam Mengajarkan Materi PKN di SD. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(4), 428–431. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.304>
- Madiong, B. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Rahayu Minto. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan (Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pertiwi, A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar sebagai upaya pembentukan karakter bangsa yang baik dan berguna. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7362-7368.
- Parawangsa, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8050–8054.
- Sumarni, T. (2021). Pengembangan Karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 15-28.
- Sundari, K., & Rahmawati, P. (2020). Solusi untuk Meningkatkan hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sekolah Dasar. *PEDAGOGIK*, VIII(2), 44–54.
- Yuliana, A. (2022). Menghargai Keberagaman di Kelas Rendah. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 10(4), 102-110.

